

LAJU INFLASI DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DAN CARA PENANGGULANGANNYA

Seno Sudarmono Hadi
Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Akademi Manajemen Informatika & Komputer BSI Jakarta
Jl. RS. Fatmawati No. 24 Pondok Labu Jakarta
seno.ssh@bsi.ac.id

ABSTRACT

Inflation occurred in Indonesia can impact positively or negatively on the economy globally, depending on the height of the low inflation rate is concerned. If inflation mild dampat is impacting positively on the economy of a society that is able to raise the level of national income and enhance people's interest for saving becomes even higher. The recipient of a fixed regular income each month as civil servants, private employees and workers are increasingly eager to do his work activities to improve the quality of life. While the stable inflation can improve financial planning dimasyarakat better, purchasing power against goods and services become more affordable so that the necessities of life are met, investing more smoothly because the motive is not a speculative investment and bank credit more smoothly, and if this situation happened in quite a long period of time will cause the real income of the society become stable, standard of living and welfare of the community meningkat. For the corporate world in areas such as trade in financial reports produced positive financial balance while the value of the country is relatively stable, whereas the heavy inflation or uncontrolled (Hyperinflasi) resulted in a decline in the economy of the community or the slack economic growth Countries. Based on the above research titles then the researcher explores how tackling the possibility of inflation in terms of deregulation or the policies conducted at Bank Indonesia especially the Government as monetary authorities in Indonesia so as to prevent a decline in economic growth as well as the slack economy of Indonesia in particular

Key Words: *Inflation, Deregulation, Standard Of Living, Economic Growth*

I. PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan sering kita jumpai pada hampir semua negara adalah inflasi.

Inflasi adalah suatu kecenderungan harga yang cenderung terus terjadi kenaikan secara umum dan terjadi dalam waktu yang lama atau terus-menerus. Jika terjadi kenaikan harga hanya terjadi pada berbagai barang tidak bisa disebut sebagai inflasi, tetapi jika kenaikan harga hampir terjadi pada semua barang yang diperjual belikan dimasyarakat dan terjadi pada kurun waktu yang cukup lama baru keadaan tersebut disebut inflasi.

Sedangkan jika kenaikan harga yang terjadi karena musiman menjelang hari raya agama atau yang terjadi hanya sekali saja dan tidak memiliki pengaruh yang berlanjut tidak bisa dikatakan inflasi. Kenaikan harga harga semacam itu tidak dianggap sebagai masalah atau penyakit ekonomi dan tidak diperlukan penanganannya secara khusus atau kebijakan khusus untuk mengantisipasinya.

Pengertian inflasi adalah peningkatan harga secara umum dan terus menerus dalam arti sederhana sebagai penyebabnya ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dalam mekanisme pasar. contohnya adalah konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat dilain pihak distribusi barang tidak lancar atau mengalami hambatan, menurunnya nilai tukar mata uang suatu negara secara kontinyu serta adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Perkataan kecenderungan dalam definisi inflasi perlu untuk digaris bawahi. Jika seandainya harga diatur oleh pihak pemerintah, maka harga yang dicatat oleh Biro Pusat Statistik (BPS) kemungkinan tidak menunjukkan kenaikan apapun karena yang dicatat adalah harga resmi dari pemerintah tetapi pada kenyataannya ada kecenderungan harga yang semakin mengalami peningkatan.

Keadaan tersebut tercermin dari harga bebas atau harga harga tidak resmi lebih tinggi jika dibandingkan harga resmi yang ditentukan pihak pemerintah. Dalam hal ini inflasi sebenarnya inflasi itu terjadi tetapi tidak diperkenankan untuk menunjukkan dirinya atau sering disebut dengan istilah inflasi yang ditutupi (*Suppressed Inflation*) yang sewaktu waktu akan timbul dan menunjukkan dirinya karena harga yang resmi ditentukan pemerintah tidak relevan lagi jika dibandingkan harga yang realitas terjadi pada masyarakat..

Perlu untuk diketahui inflasi yang terjadi di Indonesia selama 10 tahun terakhir rata-rata 7,98% salah satu cara untuk mengatasinya yaitu kebijakan moneter oleh pihak pemerintah yang dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter di Indonesia.

Indikator yang sering dipergunakan untuk mengukur tingkat inflasi di Indonesia adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meliputi komoditas makanan, minuman, tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi serta komunikasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Inflasi

Pengertian inflasi menurut beberapa ahli dalam Boediono (2001) adalah:

1. Samuelson dan Nordhaus (1998)

Inflasi dinyatakan sebagai kenaikan harga secara umum. Jadi tingkat inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum yang dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rate of inflation (year } t) = \frac{\text{Price level (year } t) - \text{price level (year } t-1)}{\text{price level (year } t-1)}$$

2. Prathama dan Mandala (2001)

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi:

- a. Kenaikan harga
Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya.
- b. Bersifat umum
Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik.
- c. Berlangsung secara terus menerus
Kenaikan harga bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan

inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

3. Parkin dan Bade (2001)

Inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari Tingkatan harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga, hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang (rupiah) untuk memperoleh barang tersebut

4. Menurut Nopirin (1987)

Inflasi adalah Proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu.

B. Teori Inflasi

Menurut Boediono (2001) ada beberapa teori inflasi diantaranya adalah:

1. Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti tentang peranan dalam proses inflasi dari Jumlah Uang Beredar (JUB), Psikologi (Harapan) mengenai kenaikan harga tersebut (*Expectation*).

Isi dari teori kuantitas adalah:

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume atau Jumlah Uang Beredar (JUB) baik uang kartal maupun giral. Apabila Jumlah Uang Beredar tidak dilakukan penambahan maka inflasi akan berhenti dengan sendirinya
- b. Laju Inflasi ditentukan oleh adanya faktor psikologi (Harapan) dimana masyarakat akan berharap adanya kenaikan harga akan terjadi pada masa yang akan datang.

2. Teori Keynes

Teori ini didasarkan pada makro ekonomi dimana aspek lain dari inflasi dimana inflasi bisa terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya.

Proses inflasi menurut teori ini adalah proses perebutan rezeki antar kelompok yang ada dimasyarakat atau sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan yang telah tersedia dimasyarakat. Akibatnya menurut teori ini dimana masyarakat melakukan permintaan yang lebih besar dibandingkan jumlah barang yang telah tersedia sehingga timbul istilah yang disebut *Inflationary Gap*.

Inflationary Gap timbul karena golongan masyarakat berhasil menterjemahkan menjadi permintaan yang lebih efektif terhadap produk atau masyarakat berhasil mendapatkan pendanaan untuk mengubah aspirasinya menjadi suatu rencana untuk

pembelian barang yang didukung dana mereka.

Golongan masyarakat ini menurut Boediono (2001) adalah:

- a. Pihak pemerintah yang menginginkan mendapatkan bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan cara defisit neraca anggarannya dengan mencetak uang baru.
- b. Pengusaha pihak swasta yang menginginkan investasi usaha baru dengan pembiayaan dari bank.
- c. Serikat buruh (SPS) yang menginginkan peningkatan gaji bagi para anggotanya melebihi tingkat produktivitas para buruh.

3. Teori Strukturalis

Menurut Boediono (2001) Teori ini lebih menekankan pada pengalaman yang terjadi di Amerika Latin dan teori ini menekankan pada tekanan dan ketegaran (*Inflexibilities*) dari struktur perekonomian negara berkembang.

Teori strukturalis sering disebut teori inflasi jangka panjang karena teori ini lebih ditekankan pada faktor jangka panjang yang menyebabkan inflasi dapat berlangsung lama. Menurut teori ini ada dua jenis ketegaran utama dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, antara lain:

- a. Ketegaran yang berupa ketidakelastisan dari penerimaan ekspor yaitu nilai ekspor yang pertumbuhannya sangat lambat dibandingkan sektor lainnya, kelambanan tersebut disebabkan karena:
 - 1). Harga pasar dunia dari barang ekspor negara tersebut tidak menguntungkan dibanding harga barang import yang harus dibayar atau sering disebut dasar pertukaran (*terms of trade*) yang semakin memburuk. Sering disebut harga barang-barang hasil alam yang merupakan komoditi ekspor dari negara berkembang akan mengalami kenaikan yang lebih lambat dibandingkan dengan barang hasil industri yang merupakan barang import dari negara yang berkembang tersebut.
 - 2). Supply produksi dari barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga (Supply dari barang ekspor yang tidak elastis) Kelambanan pertumbuhan ekspor ini berarti mengakibatkan kelambanan import barang-barang

yang dibutuhkan untuk keperluan investasi maupun konsumsi masyarakat akibatnya negara tersebut mengambil kebijakan pembangunan yang menggalakkan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya diimport (*Import Substitution Strategy*) meskipun dibutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi sedangkan kualitas yang dihasilkan produk dengan kualitas barang import. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga barang tersebut menjadi lebih tinggi atau akan mengalami kenaikan dan jika substitusi import mengalami perluasan, maka kenaikan harga semakin meluas juga yang berdampak terjadinya inflasi.

- b. Ketegaran yang berkaitan dengan ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Pertumbuhan produksi bahan makanan dalam negeri tumbuh tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita, sehingga harga bahan makanan dalam negeri ada kecenderungan terjadi kenaikan melebihi kenaikan harga barang lainnya. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan pada sektor industri untuk mendapatkan kenaikan upah atau gaji yang mengakibatkan pada kenaikan biaya produksi dan dampaknya adalah harga barang-barang mengalami kenaikan dan seterusnya dan keadaan ini akan berhenti jika harga bahan makanan tidak mengalami kenaikan. Dikarenakan adanya faktor struktural harga bahan makanan akan selalu mengalami kenaikan sehingga proses dorong-mendorong antara harga dan upah akan selalu mendapat umpan baru dan tidak berhenti.

Hal yang perlu ditekankan mengenai teori strukturalis adalah:

- 1) Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara yang sedang berkembang.
- 2) Jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga tersebut dan proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus apabila jumlah uang beredar juga bertambah terus, tanpa kenaikan jumlah uang beredar inflasi akan berhenti dengan sendirinya.

- 3). Faktor struktural yang disebut sebagai sebab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Karena sering dijumpai bahwa ketegaran tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan harga atau kebijaksanaan moneter pemerintah.

C. Penyebab Inflasi

Menurut Boediono (2001) beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengeluaran Agregat Yang Melebihi Kemampuan Perusahaan Menghasilkan Barang dan Jasa.

Tingkat pengeluaran agregatif adalah pengeluaran keseluruhan perusahaan. Apabila pengeluaran total perusahaan melebihi kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa, tentunya akan memicu kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan tersebut.

2. Tuntutan Kenaikan Upah Dari Para Pekerja

Seringkali pekerja atau karyawan perusahaan melakukan demo menuntut kenaikan upah. Adanya kenaikan upah karyawan akan menyebabkan biaya produksi barang dan jasa juga meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan harga barang dan jasa tersebut.

3. Kenaikan Harga Barang Impor

Kenaikan harga barang impor akan membawa pengaruh terhadap harga barang dalam negeri. Terlebih lagi apabila barang impor tersebut digunakan sebagai faktor produksi (bahan mentah) untuk memproduksi barang dalam negeri.

4. Penambahan Jumlah Penawaran Uang Dengan Cara Mencetak Uang Baru

Apabila jumlah uang yang beredar banyak, maka nilai uang akan turun, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.

5. Kekacauan Politik dan Ekonomi

Hal ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1998. Akibat kekacauan politik dan ekonomi tahun 1998 tersebut, angka inflasi di Indonesia mencapai 70%. Menurut Boediono (2008) angka inflasi ideal berkisar antara 3% – 4%.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan Inflasi, Kebijakan Fiskal dan Moneter, serta

Peran BI dalam menanggulangi terjadinya inflasi yang bersumber pada buku kepustakaan, brosur dan internet.

IV. PEMBAHASAN

A. Dampak Inflasi

Inflasi di Indonesia dapat berdampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat, tergantung tinggi rendahnya tingkat inflasi. Jika inflasi itu ringan, justru dapat berdampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

1. Dampak Bersifat Positif

a. Meningkatkan Pendapatan Nasional

Dengan meningkatnya tingkat inflasi, maka tingkat pendapatan dari pemerintah akan mengalami peningkatan terutama dari sektor perpajakan contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada saat terjadinya kenaikan harga dari barang dan jasa, maka kenaikan harga akan menambah jumlah pajak masukan PPN ke kas negara (Pemerintah).

b. Meningkatkan Niat Menabung Masyarakat

Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta, serta buruh semakin bergairah dalam bekerja dan melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Inflasi yang stabil membuat perencanaan keuangan masyarakat lebih baik, daya beli menjangkau, kebutuhan hidup terpenuhi, investasi lancar karena penanaman modal tidak bersifat spekulatif, kredit tidak macet. Jika dampak inflasi sering terjadi, dalam jangka panjang akan menyebabkan pendapatan riil akan lebih sejahtera. Bagi dunia usaha perdagangan, laporan keuangan perusahaan bernilai positif. Sementara, neraca keuangan negara tetap stabil.

2. Dampak Bersifat Negatif

a. Pertumbuhan Ekonomi Lambat

Jika dampak dari inflasi itu parah dimana pada saat itu terjadi inflasi yang tidak terkendali (*Hiperinflasi*), dapat menurunkan perekonomian

masyarakat yang secara luas menjadi penyebab lesunya pertumbuhan ekonomi negara. Ditambah dengan kenaikan BBM, menjadikan harga-harga barang meningkat, daya beli masyarakat menurun, uang pensiun tidak cukup lagi, dunia usaha lesu karena bahan baku dan

biayaproduksi melonjak naik, banyak PHK, pengangguran dimana-mana, dan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin.

b. Ketidakpastian Pelaku Ekonomi Dalam Pengambilan Keputusan.

Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

B. Cara Mengatasi Inflasi di Indonesia Melalui Kebijakan Pemerintah

Menurut Boediono (2001) Salah satu cara mengatasi inflasi dengan kebijakan pemerintah yaitu melalui kebijakan fiskal dan/ kebijakan moneter. Cara ini dilakukan pemerintah agar tidak menyebabkan dampak inflasi seperti meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (pengertian inflasi), menjadi tidak meluas. Karena inflasi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, kebijakan yang diambil juga harus dapat mencegah penyebab inflasi maupun timbulnya deflasi.

1. Kebijakan Di Bidang Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan fihak pemerintah yang berhubungan dengan hal finansial (Penerimaan Pemerintah),

Adapun kebijakan yang diambil fihak pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah:

a. Mengatur Tingkat Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

Dalam rangka menurunkan Inflasi di Indonesia maka harusnya/seyogyanya tingkat pengeluaran pemerintah secara keseluruhan harus dikendalikan atau diturunkan, sehingga pemerintah diharapkan tidak akan menambah tingkat pengeluaran supaya anggaran dari pemerintah tidak mengalami defisit, karena dengan adanya defisit maka anggaran pengeluaran pemerintah untuk subsidi serta pengeluaran

pembiayaan untuk kesejahteraan rakyat

akan dikurangi sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi karena dengan adanya subsidi dikurangi maka harga barang contohnya: Harga dari BBM akan mengalami kenaikan dan itu salah satu penyebab terjadinya inflasi, karena dengan adanya kenaikan harga BBM secara keseluruhan akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan sehari hari dan jika terjadi dalam jangka waktu yang lama maka akan terjadi inflasi.

b. Menaikkan Tingkat Pajak (Tax).

Demikian halnya dengan kebijakan pemerintah dengan meningkatkan tingkat penerimaan negara yang ditingkatkan dengan cara menaikkan tingkat pajak contohnya: Kenaikan tingkat PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dengan kenaikan PPN maka harga dari kebutuhan sehari hari akan mengalami kenaikan atau harga menjadi lebih mahal.

2. Kebijakan Di Bidang Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu kebijakan yang diambil fihak pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah Jumlah Uang Yang Beredar (JUB) karena penyebab terjadinya inflasi adalah JUB terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan JUB dapat dikurangi menjadi kondisi keseimbangan atau Normal (Stabil) Adapun kebijakan yang dapat diambil pemerintah adalah:

a. Politik Pasar Yang Terbuka (Open Market).

Politik pasar terbuka dilakukan fihak pemerintah melalui Bank Indonesia selaku otoritas moneter dengan cara menjual surat berharga (*Marketable Securitie*) dengan tujuan menekan JUB sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga laju dari inflasi menjadi lebih rendah. Politik open market ini sering disebut dengan istilah kebijakan uang ketat (*Tight Money Policy*) yaitu dengan jalan menjual surat berharga berupa obligasi negara kepada masyarakat (Publik) dan bank - bank sehingga Jumlah uang yang beredar (JUB) dimasyarakat menjadi berkurang dan pemberian kredit oleh perbankan atau badan kredit yang dipinjamkan

kepada masyarakat (*Debitur*) akan menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi JUB dengan kata lain laju inflasi dapat berkurang.

b. Politik Uang Ketat (Politik Diskonto)

Kebijakan lain yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam rangka untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia dengan menaikkan tingkat suku bunga bank sehingga masyarakat akan tertarik untuk menyimpan uang di bank dari pada uang dipergunakan untuk melakukan konsumsi atau berbelanja.

Politik diskonto ini dapat dilakukan dengan kebijakan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan – badan pemberi kredit untuk mengalokasi kredit ataupun pinjaman kepada pihak masyarakat, sehingga jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat menjadi berkurang dan dengan cara ini dapat menekan terjadinya inflasi.

c. Menaikkan Nilai Cadangan Bank (*Bank Reserves*)

Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia (BI) kepada pihak bank- bank umum yang besarnya ditentukan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dengan menentukan kenaikan jumlah uang yang mengendap dalam bentuk kas, dengan JUB menyebabkan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit akan mengalami penurunan sehingga JUB yang beredar dimasyarakat semakin berkurang sehingga dapat menekan laju inflasi, demikian juga Bank Indonesia akan menurunkan jumlah uang yang mengendap dalam bentuk kas maka menyebabkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit terjadi peningkatan sehingga JUB akan mengalami kenaikan sehingga akan menekan terjadinya deflasi.

3. Kebijakan Non Moneter

Kebijakan non moneter merupakan kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan finansial pemerintah atau jumlah uang yang beredar (JUB) dan kebijakan ini merupakan cara atau merupakan alternatif yang lain dalam rangka mengantisipasi terjadinya inflasi. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah:

a. Pengawasan Dan Penentuan Harga

Barang/Jasa Maksimal

Dengan metode ini diharapkan tidak ada permainan harga pihak produsen karena dengan kebijakan ini para pengusaha akan menentukan harga tidak melebihi dari batas harga maksimal yang ditentukan pihak pemerintah. Dengan kebijakan yang dipatuhi para produsen maka inflasi dapat dihindari.

b. Mendorong Pengusaha/ Produsen Meningkatkan Jumlah Produksi.

Cara ini diharapkan cukup efektif untuk mencegah terjadinya inflasi karena inflasi dapat disebabkan adanya jumlah permintaan yang cukup tinggi tidak disertai jumlah produksi barang dan jasa atau supply dari produsen, sehingga dengan himbuan atau kebijakan dari pemerintah ini akan mampu meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa sehingga inflasi dapat dihindari.

Upaya yang dilakukan pihak pemerintah antara lain:

- 1). Penentuan Prioritas Produksi.
- 2). Subsidi untuk sektor Industri.
- 3). Subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak).
- 4). Peningkatan Produksi Beras.

c. Menekan Tingkat Upah

Cara ini dilakukan pemerintah dengan cara untuk mengatur gaji/tingkat Upah Minimum Regional (UMR), karena dengan penentuan kenaikan UMR karyawan, maka pengusaha/produsen akan menaikkan harga barang/jasa yang dihasilkan dan jika terjadi dalam waktu lama akan berakibat terjadinya inflasi. Semakin seringnya pengusaha menaikkan UMR maka besarnya nilai inflasi akan mengalami peningkatan secara signifikan.

d. Pemerintah Melakukan Distribusi Langsung.

Cara yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan inflasi adalah dengan cara distribusi barang kebutuhan masyarakat secara langsung melalui Badan Usaha Logistik (BULOG) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan cara pendistribusian secara langsung tersebut maka distribusi akan semakin lancar mencegah terjadinya pasar gelap dimana para pengusaha akan dapat mempermainkan harga sehingga memacu timbulnya inflasi.

e. Pemotongan Nilai Dari Mata Uang (*Sneering*).

Cara ini dilakukan jika keadaan inflasi yang sangat parah (*Hyper Inflation*). Kebijakan pemotongan nilai

mata uang dapat dilakukan dengan cara pembekuan sebagian simpanan bank bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang akan dibekukan akan digantikan dengan simpanan jangka panjang. Cara ini pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekitar tahun 1960 pada saat inflasi mencapai 650% sehingga pihak pemerintah telah memotong nilai dari mata uang Rupiah Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1,-.

f. Devaluasi Mata Uang Rupiah

Devaluasi merupakan suatu tindakan pihak pemerintah dalam rangka menanggulangi inflasi yaitu dengan cara menurunkan nilai mata uang rupiah dengan mata uang asing.

Hal tersebut dilakukan supaya nilai mata

uang dalam negeri menjadi stabil. Sedangkan istilah dari devaluasi sering dihubungkan dengan menurunnya nilai mata uang asing dengan mata uang rupiah yang mengakibatkan harga barang naik (terjadinya inflasi) sehingga cara yang dilakukan adalah menurunkan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

g. Kebijakan Yang Berhubungan Dengan Output

Kebijakan ini dilakukan dengan cara Kebijakan penurunan pembebanan bea Masuk import barang dari luar negeri, sehingga diharapkan import barang ke Indonesia menjadi semakin meningkat, dengan bertambahnya jumlah barang yang diimpor kedalam negeri sehingga kebutuhan barang didalam negeri dapat terpenuhi hal tersebut dapat menurunkan harga barang sehingga inflasi dapat ditekan.

h. Kebijakan Dalam Penentuan Harga Dan Indexing

Kebijakan ini dilakukan dengan cara penentuan *Ceiling Price* yaitu kebijakan penetapan harga barang maksimal. Sedangkan kebijakan penetapan harga barani minimal disebut *Floor Price*

C. Peran Bank Indonesia Dalam Rangka Menanggulangi Inflasi (Stabilitas Keuangan).

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, Adapun tugas utama

Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (Perbankan dan Sistem Pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, Sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

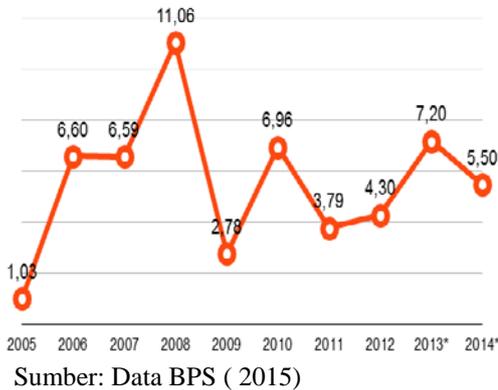
Adapun peran utama BI mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

1. Bank Indonesia (BI) memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak secara langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat cenderung bersifat

2. Bank Indonesia memiliki peran yang

- penting dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat khususnya perbankan. Penciptaan kinerja banki seperti ini dilakukan dengan mekanisme pengawasan dan regulasi seperti yang dilakukan negara lainnya, sektor perbankan memiliki pangsa pasar yang dominan dalam sistem keangan, oleh karena itu kegagalan pada sektor ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan bidang keuangan dan dapat menggagu perekonomian. Untuk dmpat mencegah terjadinya kegagalan tersebut sistem pengawasa workn dan kebijakan perbankan yang efektif harus ditegakkan . Selain itu disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dalam memce buat kebijakan serta penegakan hukum (*Law Enforcement*) harus dijalankan . Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara negara yang menerapkan disiplin pasar memiliki stabilitas keuangan yang sangat kokoh. Sementara itu penegakan hukum dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan para *stake Holder* serta mendorong kepercayaan masyarakat serta menjaga stabilan di sektor perbankan secara berkelanjutan.
3. Bank Inonesia /BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran Sistem pembayaran. Jika terjadi gagal bayar (*Failure to Settle*) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan resiko yang bersifat menular (*Contagion Risk*) sehingga mengakibatkan resiko yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran BI memiliki informasi dan keahlian ntuk mengidentifikasi resiko potensial dalam resiko sistem pembayaran.
 4. Melalui fungsinya dalam riset danm pembayar pemantauan Bank indonesia dapat mengakses informasi yang dinilai dapat mengancam stabilitas keuangan. melalui pemantauan macroprudential. Bank Indonesia dapat memonitor kerentana sektor keuangan dan mendeteksi kerentanan potensi kejutan (*Potential Shock*) yang berdampak pada stabilitas sektor keuangan . Melalui riset Bank Indonesia yang mengembangkan n instrumen serta indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
 5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *Lender of the Last Resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral secara tradisional dalam mengelola krisis guna menghindari akan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya *Moral Hazard*. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Adapun Gambaran inflasi di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2014 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar IV.1. Laju Inflasi Indonesia Tahun 2005-2014

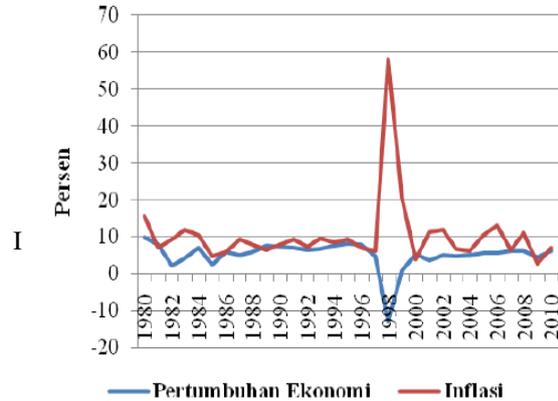
Sedangkan tabel Inflasi Indonesia Per Bulannya dari Tahun 2012 -2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1. Inflasi Indonesia Per Bulan Tahun 2012-2015

Bulan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	Inflasi	Inflasi	Inflasi	Inflasi
Jan	0,76	1,03	1,07	-0,24
Feb	0,05	0,75	0,26	NA
Mar	0,07	0,63	0,08	NA
Apr	0,21	-0,10	-0,02	NA
Mai	0,07	-0,03	0,16	NA
Jun	0,62	1,03	0,43	NA
Jul	0,70	3,29	0,93	NA
Agt	0,95	1,12	0,47	NA
Sep	0,01	-0,35	0,27	NA
Ok	0,16	0,09	0,47	NA
Nov	0,07	0,12	1,50	NA
Des	0,54	0,55	2,46	NA
Tahunan	4,30	6,38	8,36	

Sumber : BPS (2015)

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi Di Indonesia Tahun 1980-2010 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: BPS (2010)

Gambar IV.2. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi 1980-2010

Inflasi dan Indeks Harga Konsumen Indonesia Tahun 2004-2009 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel IV.2. Inflasi dan IHK Di Indonesia Tahun 2004-2010

Bulan	Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009	
	IHK	Inflasi										
Jan	110,45	0,57	118,53	1,43	130,72	1,36	147,41	1,04	158,26	1,77	113,78	-0,07
Feb	110,43	-0,02	118,33	-0,17	130,53	0,58	148,32	0,62	159,29	0,65	114,02	0,21
Mar	110,83	0,36	120,59	1,91	130,57	0,03	148,67	0,24	160,81	0,95	114,27	0,22
Apr	111,91	0,97	121,00	0,34	130,64	0,05	148,43	-0,16	161,73	0,57	113,92	-0,31
Mai	112,90	0,88	121,25	0,21	140,16	0,37	148,58	0,10	164,01	1,41	113,97	0,04
Jun	113,44	0,48	121,86	0,50	140,79	0,45	148,92	0,23	110,08	2,46	114,10	0,11
Jul	113,88	0,39	122,81	0,78	141,42	0,45	149,99	0,72	111,59	1,37	114,61	0,45
Agt	113,98	0,09	123,40	0,55	141,88	0,33	151,11	0,75	112,16	0,51	115,25	0,56
Sep	114,00	0,02	124,33	0,69	142,42	0,38	152,32	0,80	113,25	0,97	116,46	1,05
Ok	114,64	0,56	135,15	0,70	143,65	0,86	153,53	0,79	113,76	0,45	116,68	0,19
Nov	115,06	0,89	136,92	1,31	144,14	0,34	153,81	0,18	113,90	0,12	116,85	-0,83
Des	116,06	1,04	138,86	-0,04	145,89	1,21	155,50	1,10	113,86	-0,04	117,83	0,33
Tahunan		6,40		17,11		6,60		6,59		11,90		2,70

Sumber: BPS (2009)

Sumber: BPS (2009)

Inflasi dan Kenaikan Harga Di Indonesia Per Bulan Tahun 2003-2014 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel IV. 3. Inflasi dan Kenaikan Harga Indonesia Menurut Bulan Tahun 2003 -2014

Tahun	Inflasi	Kenaikan Harga	Nilai Rp
31 Des. 2013		1.000.000	1.000.000
2004	6,40%	1.064.000	936.000
2005	17,11%	1.246.050	775.850
2006	6,60%	1.328.290	724.644
2007	6,59%	1.415.824	676.890
2008	11,06%	1.572.414	602.026
2009	2,78%	1.616.127	585.290
2010	6,96%	1.728.610	544.554
2011	3,79%	1.794.124	523.915
2012	4,34%	1.871.989	501.177
2013	5,47%	1.974.387	473.763
2014	8,36%	2.139.446	434.156

Sumber: BPS, diolah.

V. KESIMPULAN

Dari Hasil Pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Inflasi adalah suatu keadaan dalam Perekonomian kecenderungan harga naik dalam waktu yang lama dan hampir semua komoditi
2. Jenis-jenis inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan atas laju dari inflasi, sebab terjadinya inflasi, serta asal terjadinya inflasi.
3. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia dapat mengantisipasi terjadinya Inflasi di Indonesia dengan beberapa kebijakan baik di bidang fiskal dan Moneter.
4. Inflasi Indonesia cukup tinggi, mencapai rata-rata 7,94% pertahunnya selama 10 tahun terakhir. Sebagai contoh, bila rata-rata belanja Anda di tahun 2013 adalah Rp1 juta, maka untuk membeli barang yang sama di tahun 2014, Anda memerlukan Rp Rp2.139.446. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai uang turun rata-rata 7,94% tiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut. Di sisi kanan tabel tersebut terlihat penurunan uang. Nilai uang Rp1 juta di tahun 2013 turun terus seiring inflasi menjadi hanya sekitar Rp434.156 di tahun 2014.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Boediono. 2001. Ekonomi Makro (Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2). Edisi 4. Yogyakarta: BPFE UGM.
2. Nasution, Mulia. 1998. Ekonomi Moneter: Uang Dan Bank. Jakarta: Djembatan
3. Nopirin. Ekonomi .2008. Moneter. Edisi Yogyakarta: BPFE UGM.
4. Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
5. Wijaya, Faried dan Hadiwigeno, Soetawo. Ekonomi Moneter Dan Perbankan. Yogyakarta: BPFE UGM.